

HISTORISITAS DAN DINAMIKA PENDIDIKAN KARAKTER DI INDONESIA

Rahmat Rifai Lubis

Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Sumatera (STAIS) Medan

Jl. Sambu No. 64 Medan

e-mail: pailubis8@gmail.com

Abstract: Character education is actually nothing new for the people of Indonesia. Even since the beginning of independence, the New Order era, and now the reform era has taken many steps in the framework of character education with different names and forms. In its journey the application of character education is not as easy as turning the palm of the hand, it is necessary to involve all components. All components are called tripusat education, in which there is a synergy between parents, educational institutions, and society. Each component must be committed to shaping the behavior and character of a child. If one of the components does not participate, there will be inequality.

Keywords: Historisitas, Dinamika, Pendidikan, Karakter

PENDAHULUAN

Pendidikan karakter sebenarnya bukan hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Bahkan sejak awal kemerdekaan, masa orde baru, dan kini orde reformasi telah banyak langkah-langkah yang sudah dilakukan dalam kerangka pendidikan karakter dengan nama dan bentuk yang berbeda-beda. Dalam UU tentang pendidikan nasional yang pertama kali, ialah UU 1946 yang berlaku tahun 1947 hingga UU, Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003 yang terakhir pendidikan karakter telah ada namun belum menjadi focus penelitian.

Sementara itu sejarah murni penerapan pendidikan karakter telah ada sejak pra kemerdekaan, terlebih bangsa Indonesia adalah negara yang memiliki keyakinan yang kuat terhadap kepercayaan yang dianutnya. Pendidikan karakter semakin mengakar ketika bangsa Indonesia telah mengikrarkan bahwa telah sampai pada pintu kemerdekaan sehingga lahirnya UUD dasar Pancasila yang terdapat lima asas, jelas didalam sila tersebut terdapat

harapan bangsa untuk menjadikan bangsa Indonesia menjadi pribadi-pribadi yang berkarakter. Secara global sejarah pendidikan karakter di Indonesia telah ada sejak pra kemerdekaan ditandai dengan adanya ajaran agama yang didalamnya termuat nilai-nilai karakter misalnya saja ajaran islam yang banyak menganut nilai-nilai karakter yang baik, kemudian secara hukum pendidikan karakter ada pasca kemerdekaan ditandai dengan terbentuk lima asas Pancasila. Hingga akhirnya pendidikan karakter merambah dalam dunia pendidikan hal ini terjadi pada tahun 2010 sebagaimana presiden Ri Indonesia yakni bapak susilo bambang yudoyono bersama menteri pendidikan Muhammad nuh yang telah meresmikan hendaknya lembaga-lembaga sekolah menerapkan pendidikan berbasis karakter sehingga muncullah kurikulum berbasis karakter, walaupun hal itu tidak berjalan mulus namun pada akhirnya muncullah kurikulum K-13 yang berbasis karakter didalamnya.

PEMBAHASAN

1. Historisitas Munculnya pendidikan karakter di Indonesia

Pendidikan karakter sesungguhnya bukan hal baru di Indonesia. Sejak zaman pra kemerdekaan, pendidikan karakter sudah dilakukan masyarakat dalam bentuk pendidikan agama atau moral, baik di sekolah maupun di pesantren. Hal ini berlanjut hingga awal tahun 2000-an. Sampai kemudian pada tanggal 2 Mei 2010, pada acara peringatan hari pendidikan nasional, menteri pendidikan Nasional RI mencanangkan secara resmi penerapan pendidikan karakter di Indonesia. (Sultoni, 2016: 3)

Seperti yang disebutkan di atas bahwa pendidikan karakter sudah ada sejak zaman pra kemerdekaan, terbukti dengan berdirinya Lembaga Pendidikan Kayutanam (INS Kayutanam) di Sumatera Barat yang dibangun oleh Mohammad Syafei (1897- 1969). Syafei menolak pendidikan barat yang hanya menekankan aspek kognitif. Syafei menginginkan peserta didiknya menjadi seseorang yang ideal, yakni tertanam cinta kebenaran dalam hatinya, dalam pengetahuan intelektualnya, dan dalam perilakunya sehari-hari. (Mulyasa dan Dewi Ispurwanti. 2011: 7).

Pasca Kemerdekaan yakni pada tahun 1946, pendidikan karakter hadir lewat lembaga Taman Siswa yang digagas oleh Ki Hadjar Dewantara, yang memiliki Panca Dharma, yaitu kemerdekaan, kodrat alam, kebudayaan, kebangsaan, dan kemanusiaan. Oleh karena itu, Dewantara mengartikan pendidikan sebagai proses pembudayaan kodrat alam setiap individu dengan kemampuan untuk mempertahankan hidup, yang tertuju pada tercapainya kemerdekaan lahir batin sehingga memperoleh keselamatan, keamanan, kenyamanan dan kebahagiaan

lahir batin. Selain itu, dikemukakan juga bahwa pendidikan mencakup tujuan personal dan tujuan sosial. Tujuan personal berkaitan dengan kokohnya tiang-tiang kemerdekaan yang mewarnai kehidupan dalam diri setiap Individu. Sedangkan tujuan sosial adalah terciptanya kebersamaan untuk membangun masyarakat yang berbudaya dan berkebangsaan yang khas berdasarkan kemanusiaan, sehingga terwujud kehidupan yang tertip, damai, aman, nyaman, dan sejahtera. Dalam asas pendidikan Taman siswa, Dewantara ingin mendidik manusia Indonesia secara utuh (kaffah), yang dapat hidup mandiri, efektif, produktif, dan akuntabel. Untuk kepentingan tersebut, masyarakat khususnya peserta didik perlu dibelaki dasar-dasar kehidupan agar memiliki kesadaran, pemahaman, kepedulian, dan komitmen yang tinggi menuju masyarakat yang aman, tertib, dan damai. (Mulyasa dan Dewi Ispurwanti. 2011: 7).

Sejarah pendidikan karakter yang terjadi pada lembaga sekolah dipicu oleh berbagai masalah yang terjadi misalnya dulunya pendidikan karakter hanya diterapkan pada mata pelajaran agama, PKN, artinya pendidikan karakter hanya diterapkan pada beberapa mata pelajaran tertentu sehingga tidak menghasilkan karakter yang optimal, karena itulah pemerintah menerapkan pendidikan karakter juga harus terintegrasi pada mata pelajaran yang lainnya.

Berlanjut pada era millennium, pendidikan karakter semakin terasa kebutuhannya yang disebabkan karena munculnya permasalahan yang terjadi di segala lini kehidupan di tanah air. Mulai dari kasus korupsi, sampai kepada banyaknya temuan kenakalan remaja yang kian merebak. Banyak pihak menilai bahwa

pendidikan adalah akar dari segala permasalahan yang saat ini terjadi. Berbagai macam konsep pendidikan telah dicoba dalam kurikulum pendidikan di Indonesia dan konsep pendidikan karakter adalah salahsatu konsep yang kini gencar disosialisasikan. (Marzuki, 2014: 178)

Dasar filosofi Indonesia ialah Pancasila. Soedarsono mengatakan bahwa pacasila disepakati menjadi (1) dasar negara, (2) pandanga hidup bangsa (3) kepribadian bangsa, (4) jiwa bangsa, (5) tujuan yang akan dicapai, (5) perjanjian luhur bangsa, (6) asas kehidupan masyarakat, berbangsa, dann bernegara, (7) asas kehidupan masyarakat, (8) pengalaman pembangunan bangsa, dan (9) jati diri bangsa.

Karakter yang berlandaskan falsafah Pancasila maknanya adalah setiap karakter harus dijiwai oleh kelima sila Pancasila secara utuh dan kompresif sebagai berikut. (Saman & Harianto, 2016: 21)

1. Bangsa yang berketuhanan yang Maha Esa, merupakan bentuk kesadaran dan prilaku dan takwa serta akhlak mulia sebagai karakteristik pribadi bagsa Indonesia.
2. Bangsa yang menjunjung kemanusiaan yang adil dan berdab, diwujudkan dalam prilaku hormat, menghormati antar warga dalam masyarakat sehingga timbul suasana kewargaan yang saling bertanggung jawab, saling hormat menghormati antra warga bangsa sehingga timbul keyakinan dan prilaku sebagai warga negara yang baik , adil dan beradab dan pada giliranannya karakter ataupun prilaku sebagai warga negara yang baik.

3. Bangsa yang mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa, memiliki komitmen dan perilaku yang selalu mengutamakan persatuan dan kesatuan Indonesia di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan.
4. Bangsa yang demokratis dan menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia
5. Bangsa yang mengedepankan keadilan dan kesejahteraan.

Sementara itu, didalam kebijakan nasional, antara lain ditegaskan bahwa pembangunan karakter bangsa merupakan kebutuhan asasi dalam proses berbangsa dan bernegara. Sejak awal kemerdekaan bangsa Indonesia sudah bertekad untuk menjadikan pembangunan karakter bangsa sebagai bahan penting dan tidak terpisahkan dari pembangunan nasional. Lebih lanjut harus diingat bahwa secara eksplisit pendidikan karakter (watak) adalah amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasiomal pada pasal 3 menegaskan bahwa "*Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta perdaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwakepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.*"

Dalam arah dan kebijakan dan prioritas pendidikan karakter ditegaskan bahwa pendidikan karakter sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pencapaian visi pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-

2025. Bahwa pendidikan karakter sejalan dengan prioritas pendidikan nasional, dapat dicermati dari standar Kompetensi Lulusan (SKL) pada setiap jenjang pendidikan. sebagaimana diketahui untuk memantau pelaksanaan pendidikan dan mengukur ketercapaian kompetensi yang ingin diraih pada setiap jenjang pendidikan telah diterbitkan Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang standar Kompetensi Lulusan (SKL). Jika dicermati secara mendalam, sesungguhnya hampir pada setiap SKL/MI, SMP/MTs, SMA/MA, membuat substansi nilai/ karakter.

Jadi dapat kita simpulkan bahwa pendidikan karakter di Indonesia terjadi sebelum pra kemerdekaan hal ini ditandai dengan tersebar luasnya ajaran agama dalam berbagai ragam agama yang ada di Indonesia, khususnya agama islam, sebagaimana yang sudah kita ketahui agama islam adalah agama yang mengadopsi nilai-nilai karakter yang baik, kemudian ditandai juga beraneka ragam budaya dan lain sebagainya. Namun setelah merdeka semakin jelas pendidikan karakter di Indonesia ditandai dengan terdapat lima asas Pancasila. Secara global 5 asas Pancasila mewakili penerapan pendidikan karakter di Indonesia. Namun seiring berkembangnya pemikiran, Indonesia memasukkan penerapan pendidikan karakter didalam lembaga pendidikan yang dicanangkan dalam UUD tahun 2003 selanjutnya tahun 2010 dan pengaplikasiannya di tahun 2013, sehingga lahir lah kurikulum berbasis karakter yang disebut dengan K-13.

2. Landasan Hukum Pendidikan karakter Di Indonesia

a. UUD 1945

Pada saat Amandemen ke-4 dari UUD 1945 di lakukan beberapa perubahan terutama pada pasal 31. Pada ayat ke-3

tampaknya menjadi landasan utama dari pendidikan karakter selain landasan-landasan lainnya yang muncul belakangan. Pada pasal 31 ayat ke-3 disebutkan bahwa "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang". Dari pasal ini kita dapat melihat bahwa pendidikan dalam skala nasional mengusahakan agar para anak didik bangsa selain memiliki pengetahuan, namun juga memiliki aspek spiritual dan afektual. Bahkan lebih ditegaskan karena menggunakan istilah Akhlak mulia.

b. UU RI Nomor 17 Tahun 2007 tentang RJPN

Dalam undang-undang RI nomor 17 tahun 2007 tentang RJPN, dinyatakan bahwa tujuan pembangunan jangka panjang tahun 2005-2025 adalah mewujudkan bangsa yang maju, mandiri, dan adil sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat yang adil dan makmur dalam NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Salah satu ukuran tercapainya Indonesia yang maju, mandiri dan adil, pembangunan nasional dalam 20 tahun mendatang adalah terwujudnya bangsa Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, bertetika, berbudaya dan beradab, pencapaian tersebut ditandai oleh hal-hal berikut (Arifin, 2012: 44):

- 1) Terwujudnya karakter bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, dan bermoral berdasarkan falsafah Pancasila yang dicirikan dengan watak dan perilaku manusia dan masyarakat Indonesia yang beragama, beriman dan bertakwa

kepada Tuhan Yang Maha Esa berbudi Luhur, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotic, berkembang dinamis dan dan berorientasi iptek.

- 2) Makin mantapnya budaya bangsa yang tercermin dalam meningkatnya peraban, harkat, dan martabayt manusia Indonesia dan menguatkan jati dirinya dan kepribadian bangsa.

c. UU RI 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermatabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan dan berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yng beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak Mulia, sehat, Berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Dari 2 fungsi, ada dua hal penting yang harus diwujudkan lembaga pendidikan. pertama, mengembangkan kemampuan, kedua, membentuk watak. Pengembangan kemampuan berkaitan dengan head, sedangkan mengembangkan watak berkaitan dengan heart, outcome pengembangan kemampuan merujuk pada kualitas akademik sedangkan outcome dari membentuk watak adalah terwujudnya lulusan yang khusnul khuluq.

d. Inpres No. 1 Tahun 2010: Percepatan pelaksanaan Pembangunan Nasional Tahun 2010

Substansi dari INPRES Nomor 1 tahun 2010 di sajikan dalam tabel di bawah ini :

Prog.	Tindakan	Keluaran	Sasaran
Penguatan metodologi dan kurikulum	Penyempurnaan kurikulum dan metode pembelajaran aktif berdasarkan nilai-nilai budaya bangsa ntuk membentuk daya saing dan karakter bangsa.	Terimplementasinya uji kurikulum dan metode pembelajaran aktif berdasarkan nilai-nilai budaya bangsa untuk membentuk daya saing dan karakter bangsa.	Terwujudnya kurikulum dan metode pembelajaran aktif berdasarkan nilai-nilai budaya bangsa untuk membentuk daya saing dan karakter bangsa.

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa penekanan Inpres tersebut pada dua hal yaitu metode pembelajaran aktif dan membentuk daya saing dan karakter bangsa.

3. Pendekatan-pendekatan dalam Pelaksanaan pendidikan karakter di Indonesia.

Pendekatan Pendidikan Karakter di Indonesia dapat kita rujuk berdasarkan keputusan Berikut Kemendiknas (2010) tentang pendekatan pendidikan karakter yaitu :

a. Keteladanan

Terlaksananya pendidikan karakter tergantung dari dukungan satuan pendidikan formal dan nonformal. Satuan pendidikan formal dan nonformal harus menunjukkan keteladanan yang mencerminkan nilai-nilai karakter yang ingin dikembangkan. Misalnya toilet yang selalu bersih, bak sampah ada di berbagai tempat dan selalu dibersihkan, satuan pendidikan formal dan nonformal terlihat rapi, dan alat belajar ditempatkan teratur. Selain itu, keteladanan juga dapat ditunjukkan dalam perilaku dan sikap pendidik dan tenaga kependidikan dalam memberikan contoh tindakan-tindakan yang baik sehingga diharapkan menjadi panutan bagi peserta didik untuk mencontohnya. Pendemonstrasian berbagai contoh teladan merupakan langkah awal pembiasaan. Jika pendidik

dan tenaga kependidikan menghendaki agar peserta didik berperilaku dan bersikap sesuai dengan nilai-nilai karakter, maka pendidik dan tenaga kependidikan yang lain adalah orang yang pertama dan utama memberikan contoh bagaimana berperilaku dan bersikap sesuai dengan nilai-nilai pendidikan karakter. (Purwanto, 2014: 194)

b. Pembelajaran

Pembelajaran karakter dilakukan melalui berbagai kegiatan di kelas, di satuan pendidikan formal dan nonformal, serta di luar satuan pendidikan.

Pembelajaran karakter dilaksanakan melalui proses belajar setiap materi pelajaran atau kegiatan yang dirancang khusus. Setiap kegiatan belajar mengembangkan kemampuan dalam ranah kognitif, afektif, konatif, dan psikomotor. Pengintegrasian pendidikan karakter ke dalam semua materi pembelajaran dilakukan dalam rangka mengembangkan keempat ranah tersebut. Substansi nilai sesungguhnya secara eksplisit atau implisit sudah ada dalam rumusan kompetensi (SKL, SK, dan KD) dalam Standar Isi (Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah), serta perangkat kompetensi masing-masing program studi di pendidikan tinggi. Perlunya memastikan bahwa pembelajaran materi pembelajaran tersebut memiliki dampak instruksional dan/atau dampak pengiring pembentukan karakter. Dan Pembelajaran karakter dilaksanakan melalui berbagai kegiatan satuan pendidikan formal dan nonformal yang diikuti seluruh peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Perencanaan dilakukan sejak awal tahun pelajaran, dimasukkan ke kalender akademik, dan dilaksanakan sehari-hari sebagai bagian dari budaya satuan pendidikan formal dan nonformal.

Budaya satuan pendidikan formal dan nonformal adalah suasana kehidupan satuan pendidikan formal dan nonformal di mana peserta didik berinteraksi dengan sesamanya, pendidik dengan pendidik, pendidik/konselor dengan peserta didik, pendidik dengan tenaga kependidikan, antara tenaga kependidikan dengan pendidik peserta didik, dan antar anggota kelompok masyarakat dengan warga satuan pendidikan formal dan nonformal. Interaksi sosial kultural internal kelompok dan antar kelompok terikat oleh berbagai aturan, norma, moral serta etika bersama yang berlaku di suatu satuan pendidikan formal dan nonformal. Jujur, bertanggung jawab, cerdas, kreatif, sehat dan berprestasi, peduli, dan gotong royong merupakan nilai-nilai yang dikembangkan dalam budaya satuan pendidikan formal dan nonformal. (Purwanto, 2014: 194).

Pendidikan karakter juga terjadi melalui kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan lain yang diikuti oleh seluruh/sebagian peserta didik, dirancang satuan pendidikan formal dan nonformal sejak awal tahun pelajaran atau program pembelajaran, dan dimasukkan ke dalam kalender akademik. Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler akan semakin bermakna jika diisi dengan berbagai kegiatan bermuatan nilai yang menarik dan bermanfaat bagi peserta didik. Kegiatan yang akan dikembangkan dalam pembentukan karakter adalah kegiatan yang terencana, terprogram, dan tersistem.

c. Pemberdayaan dan Pembudayaan

Pada tahap implementasi pengembangan karakter dikembangkan pengalaman belajar dan proses pembelajaran yang bermuara pada pembentukan karakter dalam diri peserta didik. Proses ini dilaksanakan melalui

proses pemberdayaan dan pembudayaan sebagaimana digariskan sebagai salah satu prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional. Proses ini berlangsung dalam tiga pilar pendidikan yakni dalam satuan pendidikan formal (sekolah), informal (keluarga) dan nonformal (masyarakat).

d. Penguatan

Penguatan sebagai respon dari pendidikan karakter perlu dilakukan dalam jangka panjang dan berulang terus-menerus. Penguatan dimulai dari lingkungan terdekat dan meluas pada lingkungan yang lebih luas. Di samping pembelajaran dan pemodelan, penguatan merupakan bagian dari proses intervensi. Penguatan juga dapat terjadi dalam proses habituasi. Hal itu akhirnya akan membentuk karakter yang akan terintegrasi melalui proses internalisasi dan personalisasi pada diri masing-masing individu.

Penguatan dapat juga dilakukan dalam berbagai bentuk termasuk penataan lingkungan belajar dalam satuan pendidikan formal dan nonformal yang menyentuh dan membangkitkan karakter. Berbagai penghargaan perlu diberikan kepada satuan pendidikan formal dan nonformal, pendidik, tenaga kependidikan, atau peserta didik untuk semakin menguatkan dorongan, ajakan, dan motivasi pengembangan karakter.

e. Penilaian

Pada dasarnya, penilaian terhadap pendidikan karakter dapat dilakukan terhadap kinerja pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik. Kinerja pendidik atau tenaga kependidikan dapat dilihat dari berbagai hal terkait aturan yang melekat pada diri pegawai, antara lain: (1) *hasil kerja*: kualitas kerja, kuantitas kerja, ketepatan waktu penyelesaian kerja, kesesuaian dengan prosedur; (2) *komitmen*

kerja: inisiatif, kualitas kehadiran, kontribusi terhadap keberhasilan kerja, kesediaan melaksanakan tugas dari pimpinan; (3) *hubungan kerja*: kerja sama, integritas, pengendalian diri, kemampuan mengarahkan dan memberikan inspirasi bagi orang lain. (Purwanto, 2014: 195-198).

Sementara itu menurut Superka terdapat lima pendekatan yang dipandang sesuai dan bermanfaat dalam pelaksanaan pendidikan karakter di Indonesia. Di antara adalah (Zobaedi, 2010: 206):

- Pendekatan Penanaman Nilai

Pendekatan penanaman nilai adalah suatu pendekatan yang memberi penekanan pada penanaman nilai-nilai sosial dalam diri siswa. Menurut pendekatan ini, tujuan pendidikan nilai adalah diterimanya nilai-nilai sosial tertentu oleh siswa dan berubahnya nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai sosial yang diinginkan. Menurut pendekatan ini, metode yang digunakan dalam proses pembelajaran antara lain ketelanan, penguatan positif dan negative, simulasi, permainan peranan, dan lain-lain. (Muslich: 2011: 108)

Dalam perkembangannya, pendekatan penanaman nilai mungkin tidak sesuai dengan alam pendidikan Barat yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan Individu. Meskipun demikian, seperti dijelaskan Superka disadari atau tidak disadari pendekatan ini digunakan secara meluas dalam berbagai masyarakat, terutama dalam penanaman nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya. Para penganut agama memiliki kecenderungan yang kuat untuk menggunakan pendekatan ini dalam pelaksanaan program-program pendidikan agama. Bagi penganut-penganutnya, agama merupakan ajaran yang memuat nilai-nilai ideal yang bersifat global dan kebenarannya bersifat mutlak.

Pada sisi lain, nilai-nilai harus diterima dan dipercayai, oleh karena itu, proses pendidikannya harus bertitik tolak dari ajaran atau nilai-nilai tersebut. Seperti dipahami bahwa dalam banyak hal batas-batas kebenaran dalam ajaran agama sudah jelas, pasti, dan harus diimani. Ajaran agama tentang berbagai aspek kehidupan harus diajarkan, diterima, dan diyakini kebenarannya oleh pemeluk-pemeluknya keimanan merupakan dasar penting dalam pendidikan agama.

- Pendekatan Perkembangan Kognitif.

Pendekatan ini mendorong siswa untuk berfikir aktif tentang masalah-masalah moral dan dalam melakukan keputusan-keputusan moral. Menurut pendekatan ini, perkembangan moral dilihat sebagai perkembangan tingkat berfikir dalam membuat pertimbangan moral, dari suatu tingkat yang lebih rendah menuju suatu tingkat yang lebih tinggi.

Ada dua tujuan utama yang ingin dicapai oleh pendekatan ini. Pertama, membantu siswa dalam membuat pertimbangan moral yang lebih kompleks berdasarkan kepada nilai yang lebih tinggi. Kedua, mendorong siswa untuk mendiskusikan alasan-alasannya ketika memilih nilai dan posisinya dalam suatu masalah moral.

Menurut pendekatan ini, proses pengajaran nilai didasarkan pada dilemma moral, dengan menggunakan metode diskusi kelompok. Diskusi itu dilaksanakan dengan memberi perhatian pada tiga kondisi penting. Pertama, mendorong siswa menuju tingkat pertimbangan moral yang lebih tinggi, kedua, adanya dilemma hipotetikal maupun dilemma factual berhubungan dengan nilai dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, suasana yang dapat mendukung bagi berlangsungnya

diskusi dengan baik. Proses diskusi dimulai dengan penyajian cerita yang mengandung dilema. Dalam diskusi tersebut siswa didorong dilakukan oleh orang yang terlibat dan alasannya. Siswa diminta mendiskusikan tentang alasan-alasan itu dengan teman-temannya.

- Pendekatan Analisis Nilai

Pendekatan analisis nilai ini menekankan agar peserta didik dapat menggunakan kemampuan berpikir logis dan ilmiah dalam menganalisis masalah sosial yang berhubungan dengan nilai tertentu. Selain itu peserta didik dalam menghubungkan dan merumuskan konsep tentang nilai mereka sendiri. Cara yang dapat digunakan dalam pendekatan ini, antara lain diskusi terarah yang menuntut argumentasi, penegasan bukti, penegasan prinsip, analisis terhadap kasus, debat, dan penelitian (Zuriah, 2007: 65). Jika dibandingkan dengan pendekatan perkembangan kognitif, pendekatan analisis nilai lebih menekankan pada pembahasan masalah-masalah yang memuat nilai-nilai sosial.

Ada dua tujuan utama pendidikan moral menurut pendekatan ini. Pertama, membantu siswa untuk menggunakan kemampuan berfikir logis dan penemuan ilmiah dalam menganalisis masalah-masalah sosial, yang berhubungan dengan nilai moral tertentu. Kedua, membantu siswa menggunakan proses berfikir analitis dan analitik dalam menghubungkan dan merumuskan konsep tentang nilai-nilai mereka. Selanjutnya metode-metode pengajaran yang sering digunakan adalah pembelajaran secara individu atau kelompok tentang masalah-masalah sosial yang memuat nilai moral, penyelidikan kepustakaan, penyelidikan lapangan dan diskusi kelas berdasarkan kepada pemikiran analitis. (Muslich: 2011: 114)

Menurut pendekatan ini ada enam langkah analisis nilai yang penting dan perlu diperhatikan dalam proses pendidikan karakter. Enam langkah tersebut menjadi dasar dan sejajar dengan enam tugas penyelesaian masalah berhubungan dengan nilai. enam langkah tersebut sebagai berikut:

Langkah analisis nilai	Tugas penyelesaian masalah
Menggunakan dan menjelaskan nilai yang terkait.	Mengurangi perbedaan penafsiran tentang nilai yang terkait.
Menggumpulkan fakta yang berhubungan.	Mengurangi perbedaan dalam fakta yang berhubungan.
Menguji kebenaran fakta yang berkaitan.	Mengurangi perbedaan kebenaran tentang fakta yang berkaitan.
Menjelaskan kaitan antara fakta yang bersangkutan	Mengurangi perbedaan tentang kaitan antara fakta yang bersangkutan
Merumuskan keputusan moral sementara.	Mengurangi perbedaan dalam rumusan keputusan sementara.
Menguji prinsip moral yang digunakan dalam pengambilan keputusan.	Mengurangi perbedaan dalam pengujian prinsip moral yang diterima.

Kelemahannya, pendekatan ini hanya berdasarkan kepada prosedur analisis yang ditawarkan serta tujuan dan metode pengajaran yang digunakan. Pada sisi lain, pendekatan ini sangat menekankan aspek kognitif, dan sebaliknya mengabaikan aspek afektif dan perilaku. Dari perspektif yang lain, pendekatan ini sama dengan pendekatan perkembangan kognitif dan . bagisi nilai.

- Pendekatan Klarifikasi Nilai

Pendekatan klarifikasi nilai memberi penekanan pada usaha membantu siswa dalam mengkaji perasaan dan

perbuatannya sendiri, untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang nilai-nilai mereka sendiri. Menurut pendekatan ini, tujuan pendidikan karakter ada tiga. Pertama, membantu siswa agar menyadari dan mengidentifikasi nilai-nilai mereka sendiri serta nilai-nilai orang lain. Kedua, membantu siswa agar mampu berkomunikasi secara terbuka dan jujur dengan orang lain, berhubungan dengan nilai-nilainya sendiri.

Ketiga, membantu siswa agar mampu menggunakan secara bersama-sama kemampuan berfikir rasional dan kesadaran emosional, mampu memahami perasaan, nilai-nilai, pola tingkah laku mereka sendiri. Dalam proses pengajarannya, pendekatan ini menggunakan metode dialog, menulis, diskusi dalam kelompok bear atau kecil dan lain-lain.

Pendekatan ini memberi penekanan pada nilai yang sesungguhnya dimiliki oleh seseorang. Bagi penganut pendekatan ini, nilai bersifat subjektif,, ditentukan oleh seseorang berdasarkan kepada berbagai latar belakang pengalamannya sendiri, tidak ditentukan oleh factor luar, seperti agama, masyarakat, dan sebagainya. Oleh karena itu, bagi penganut pendekatan ini isi nilai tidak terlalu penting. Hal yang sangat dipentingkan dalam program pendidikan adalah mengembangkan keterampilan siswa dalam melakukan proses menilai. Sejalan dengan pandangan tersebut, sebagaimana dijelaskan oleh elia, bahwa bagi penganut pendekatan ini, guru bukan sebagai pengajar nilai, melainkan sebagai role model dan pendorong. Peranan guru adalah mendorong siswa dengan pertanyaan-pertanyaan yang relevan untuk mengembangkan keterampilan siswa dalam melakukan proses menilai.

Kekuatan pendekatan ini terutama memberikan penghargaan yang tinggi kepada siswa sebagai individu yang mempunyai hak untuk memilih, menghargai, dan bertindak berdasarkan kepada nilainya sendiri. Metode pengajarannya juga sangat fleksibel, selama dipandang sesuai dengan rumusan proses menilai dan empat garis panduan yang ditentukan, seperti telah dijelaskan di atas.

- Pendekatan Pembelajaran Berbuat

Pendekatan pembelajaran berbuat menekankan pada usaha memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan perbuatan-perbuatan moral, baik secara perseorangan maupun secara bersama-sama dalam suatu kelompok. Superka menyimpulkan ada dua tujuan utama pendidikan moral berdasarkan kepada pendekatan ini. Pertama, memberi kesempatan kepada siswa untuk melakukan perbuatan moral, baik secara perseorangan maupun secara bersama-sama, berdasarkan nilai-nilai mereka sendiri. Kedua, mendorong siswa untuk melihat diri mereka sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam pergaulan dengan sesame, yang tidak memilih kebebasan sepenuhnya, melainkan sebagai warga dari suatu masyarakat, yang harus mengambil bagian dalam suatu proses demokrasi.

Kekuatan pendekatan ini terutama pada program-program yang disediakan dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan demokrasi. Kesempatan seperti, menurut Hersh kurang mendapat perhatian dalam berbagai pendekatan lain. Sementara itu, kelemahan pendekatan ini, menurut Elias sulit dipraktikkan. Menurut beliau, sebagian dari program-program yang dikembangkan oleh Newmann dapat digunakan, namun secara keseluruhannya

sukar dilaksanakn. Menurut Elias, Hersh dan Superka pendekatan pembelajaran berbuat diprakarsai oleh Newmann, dengan memberikan perhatian mendalam pada usaha melibatkan siswa sekolah menengah atas dalam melakukan perubahan-perubahan sosial. Menurut Elias, walaupun pendekatan ini berusaha juga untuk meningkatkan keterampilan “moral reasoning” dan dimensi afektif, namun tujuan yang paling penting adalah memberikan pengajaran kepada siswa, supaya mereka berkemampuan untuk mempengaruhi kebijakan umum sebagai warga dalam suatu masyarakat yang demokratis. (Syaefuddin & Karim, 2008: 33)

4. Konsep Pengembangan Pendidikan karakter di Indonesia

Dalam hal konsep pengembangan pendidikan karakter di Indonesia, kami mengutip buku point-point besar yang telah dituliskan bapak haidar daulay dalam buku pendidikan karakter, bahwasanya konsep yang dapat dikembangkan diantaranya :

a. Membangun karakter Bangsa melalui pemberdayaan Pendidikan karakter

Banyak cara yang dapat diterapkan dalam pendidikan karakter salah satu diantaranya adalah dengan mengefektifkan dan memberdayakan pendidikan agama yang dilaksanakan dilembaga pendidikan formal, nonformal dan informal. Memberdayakan pendidikan bermakna akan melahirkan orang beriman, beribadah dan berakhlak. Ketiga domain menuju kepada terbentuknya pendidikan karakter yang baik terutama pendidikan akhlak. Melalui pengefektifan dan pemberdayaan pendidikan agama bermakna akan melahirkan manusia yang berakhlak mulia

yang sejalan dengan manusia yang berkarakter. (Daulay, 2016: 19)

b. Pendidikan Karakter Melalui Pendidikan Kearifan Lokal

Setiap suku di Indonesia memiliki kearifan local. Kearifan local boleh jadi silang antar suku, kehidupan di kota-kota, Bahasa daerah dan lain sebagainya. Pendidikan karakter melalui kearifan local dengan cara menggali karakter-karakter dalam lingkungan local misalnya saja dalam lingkungan keluarga, suku budaya adat dan lain sebagainya. (*Ibid.*, 27)

c. Pemberdayaan Pendidikan Karakter Melalui Mata Pelajaran

Dalam setiap mata pelajaran yang disajikan dengan pokok bahasan tertentu akan dapat dirancang nilai-nilai positif (*value*), seperti kejujuran, keterbukaan, disiplin, hemat, rendah hati (*tawaddu*), kerjasama dan lain-lain. Di Indonesia sebagai hasil Sarasehan Nasional Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa yang dilaksanakan di Jakarta tanggal 14 Januari 2019 telah dicapai Kesepakatan Nasional Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter bangsa yang dinyatakan sebagai berikut: (Saman dan Hariyanto, 2016: 105)

- Pendidikan karakter budaya dan karakter bangsa merupakan bagian integral yang tak terpisahkan dari pendidikan nasional secara utuh.
- Pendidikan budaya karakter bangsa harus dikembangkan secara komprehensif sebagai proses pembudayaan. Oleh karena itu, pendidikan kebudayaan secara kelembagaan perlu diwadahi secara utuh.
- Pendidikan budaya dan karakter bangsa merupakan tanggung jawab antara pemerintah dan masyarakat, sekolah dan orang tua. Oleh karena itu, pelaksanaan pendidikan

- Dalam upaya merevitalisasi pendidikan budaya dan karakter diperlukan gerakan nasional guna menggugah semangat kebersamaan dalam pelaksanaan dilapangan. (*Ibid.*, 106)

5. Peluang dan Hambatan Pelaksanaan Pendidikan Karakter di Indonesia

Peluang dan hambatan dalam pelaksanaan pendidikan karakter di Indonesia dalam terlihat dari berbagai polemik-polemik yang terjadi misalnya saja berupa kegagalan-kegagalan dalam instansi lembaga sekolah, pergantian menteri yang merambah menjadi pergantian kurikulum, terdapat perilaku-perilaku yang menyimpang seperti korupsi, narkoba, tawuran anak sekolah dan lain sebagainya.

Perjalanan pendidikan karakter yang begitu panjang ini, pada akhirnya akan menjadi benalu dalam dunia pendidikan kita, karena setiap pergantian menteri, pasti ada pergantian kurikulum. Kemunculan pendidikan karakter pun dicurigai sebagai titipan dari kalangan tertentu yang hendak mengacaukan sistem pendidikan nasional, karena meskipun dari awal mendapatkan respon positif, belakangan memulai kritik dan perdebatan yang cukup panjang. Menganalisis kegagalan pendidikan karakter tidak hanya sepihak mengatakan bahwa kurikulum yang dirancang pemerintah gagal total memenuhi ekspektasi masyarakat, orangtua, dan pemerhati pendidikan. Berhasil tidaknya sebuah kurikulum baru tentu dikembalikan kepada pihak yang terlibat langsung dalam penerapan pendidikan karakter. Sebuah rancangan kurikulum bisa dianggap gagal apabila masyarakat luas mengklaim telah terjadi kesalahan metodologis dalam penerapan di lapangan. Antara konsep yang ditawarkan ternyata tidak sejalan dengan kenyataan, bahkan sering kali tidak koheran dalam

konteks implementasi dan internalisasi sehingga terjadi kedangkalan nurani dalam memaknai pendidikan. (Takdir, 2014: 95).

Kelemahan pendidikan karakter tentu saja menjadi masalah tersendiri ketika desain kurikulum ini diterapkan di sekolah. Kebijakan pendidikan karakter yang bermasalah pada gilirannya akan menghambat implementasi pengembangan kurikulum secara simultan sehingga menjadi antiklimaks bagi anak didik sebagai subjek yang harus menerima kebijakan ini tanpa ada pemerhati serius dari pemerintah. factor determinan yang menjadi tantangan dalam proses penerapan pendidikan karakter adalah menyangkut dualisme kebijakan pendidikan itu sendiri. Pada satu sisi, pendidikan hendak menekankan pada aspek atau standar nilai kepribadian, disisi yang lain sistem penilaian dengan aspek kelulusan yang mengawang melalui ujian Nasional menuntut para guru dan siswa berpacu mencapai standar isi, dengan angka-angka yang harus dijangkau sehingga bisa mencapai standar kelulusan. Sederhananya apa pedulinya guru dan siswa dengan masalah karakter, semisal nilai-nilai moral, kejujuran, tanggung jawab, dan kedisiplinan, kalua pada akhirnya tidak lulus Ujian Nasional? hal ini sungguh ironis dan menjadi dilemma tersendiri dari sebuah dualism kebijakan yang tidak mampu membawa perubahan signifikan bagi pembentukan karakter bangsa.

Meskipun pendidikan karakter sudah diterapkan secara menyeluruh oleh pemerintah, desain kurikulum ini tetap tidak akan mampu mengatasi krisis moral anak. Masalahnya, desain kurikulum ini mengalami inkonsistensi dan disorientasi yang terjadi pada sekolah dan guru sebagai tenaga pendidik. Factor inkonsistensi dan disorientasi bisa menjadi penghambat

semangat sekolah dan guru dalam memerhatikan kebutuhan anak didik ketika mengalami tantangan hidup diluar dirinya. sekolah harus bersikap konsisten dalam menerapkan kenijakan kurikulum agar tidak membingungkan anak didik, begitu pula dengan guru yang menjadi bagian dari pengembangan pendidikan karakter disekolah.

Jika pemerintah ingin pendidikan karakter bisa berjalan optimal, sudah saatnya semua komponen dirangkul dalam rangka mengintegrasikan desain kurikulum yang ada sesuai dengan kebutuhan anak didik. Penulis menyadari bahwa penerapan pendidikan karakter tidak semudah membalik telapak tangan, karena itu harus melibatkan semua komponen sekolah yang memiliki perhatian lebih terhadap pembentukan karakter bangsa. (*Ibid.*, 312)

PENUTUP

Pendidikan karakter sebenarnya bukan hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Bahkan sejak awal kemerdekaan, masa orde baru, dan kini pasa reformasi telah banyak langkah-langkah yang sudah dilakukan dalam kerangka pendidikan karakter dengan nama dan bentuk yang berbeda-beda. Landasan Hukum Pendidikan Karakter di Indonesia, UUD 1945 pasal 31 ayat 3, Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2007 tentang RJPN, UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Inpres No. 1 Tahun 2010: Percepatan pelaksanaan Pembangunan Nasional Tahun 2010. Konsep Pengembangan Pendidikan karakter di Indonesia melalui beberapa hal, yakni Membangun karakter Bangsa melalui pemberdayaan Pendidikan karakter, Pendidikan Karakter Melalui Pendidikan Kearifan Lokal, Pemberdayaan Pendidikan Karakter Melalui Mata Pelajaran

DAFTAR PUSTAKA

- Muchlas saman dan harianto. 2016. *Konsep Dan Model Karakter*. Bandung : Pt Remaja Rosdakarya.
- Barnawi dan M. Arifin. 2012. *Strategi dan Kebijakan Pembelajaran Pendidikan karakter*. Yogyakarta : Ar-ruzz Media.
- Mohammad Takdir.2014. *Gagalnya Pendidikan Karakter, Analisis Dan Solusi Pengendalian Karakter Emas Anak Didik*. Yogyakarta : Ar-Ruzz Media.
- Pupuh Fathurrohman, suryana dkk. 2013. *Pengembangan Pendidikan karakter*. Bandung : Pt Refika Aditama.
- Manur Muslich.2011. *Pendidikan Karakter Menjawab Tantangan Krisis multidimensional*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Mulyasa dan Dewi Ispurwanti. 2011. *Manajemen Pendidikan Karakter*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Jurnal : Sultoni, Achmad. Juni 2016. "Pendidikan Karakter Dan Kemajuan Negara: Studi Perbandingan Lintas Negara". Joies Journal, Volume 1, Nomor 1.
- Jurnal : Nurdin, *Pendidikan Karakter, jurnal*, Dosen Jurusan Dakwah STAIN Sultan Qaimuddin Kendari
- Nurul Zuriah, 2007. *Pendidikan Moral dan Budi Pekerti dalam Perspektif Perubahan, Menggagas Platfom Pendidikan Budi Pekerti secara Konstektual dan Futuristik*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Haidar Putra Daulay dan Nurgaya, *Pendidikan karakter*, (Medan : Cv. Manhaji Medan, 2016) H. 19
- Said Hamid Hasan dkk. 2010. *Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa*, (Jakarta: BPP Puskur Kemdiknas.
- Nanang Purwanto. 2014. *Pengantar Pendidikan*. Yogyakarta:Graha Ilmu
- Fedyani Saifuddin & Mulyawan Karim. 2008. *Refleks Karakter Bangsa*,. Jakarta: CV Pustaka,